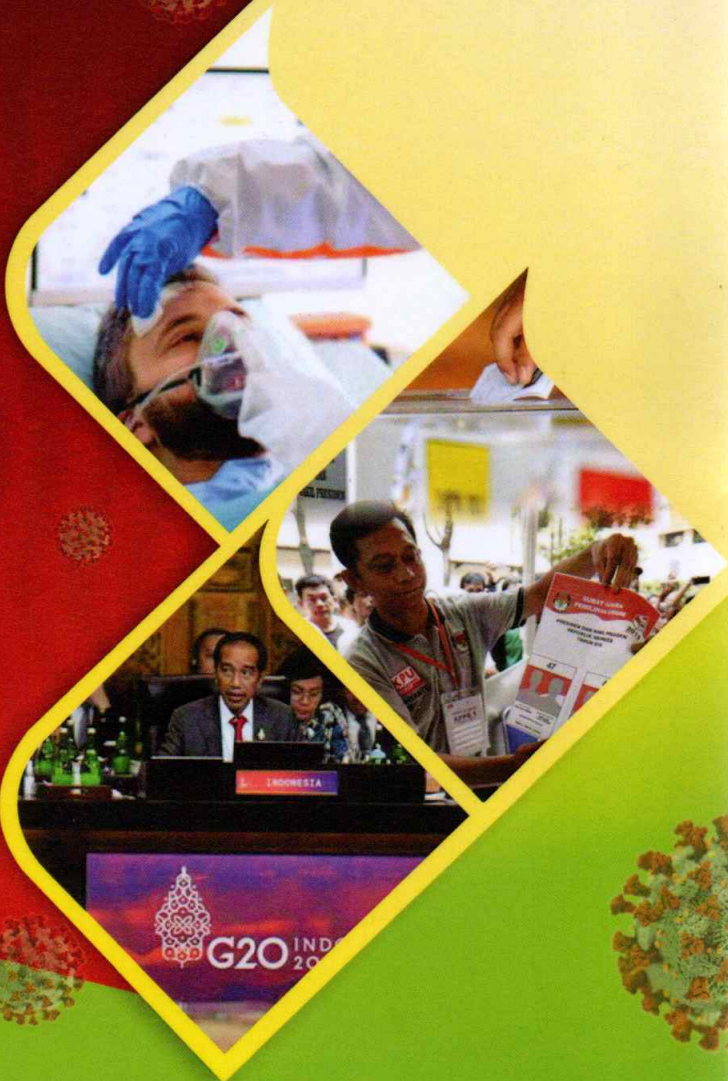


Sri Yunanto

leutikaprio



Dari Pandemi ke Demokrasi

● Esai - Esai Tentang Politik, Islam, dan Keamanan

DARI PANDEMI KE DEMOKRASI:

Esai-Esai tentang Politik, Islam, dan Keamanan

--Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022

ix + 138 hlm.; 15,4x23 cm

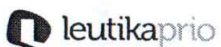
Cetakan Pertama, Desember 2022

Penulis : Dr. Sri Yunanto

Pemerhati Aksara : LeutikaPrio

Desain Sampul : Anwar

Tata Letak : Anwar



Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta, 55243
Telp. (0274) 5015594
www.leutikaprio.com
email: leutikaprio@hotmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin dari penerbit.

ISBN: 978-602-371-999-0

Dicetak oleh CV Fawwaz Mediacipta

Isi di luar tanggung jawab penerbit & percetakan.

Prolog

Akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 adalah masa yang sulit bagi bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Pandemi Covid 19 yang menghantam negara-negara di seluruh dunia telah *menyebabkan* bencana kesehatan yang paling parah. 641 juta orang terinfeksi dan 6,63 juta diantaranya meninggal dunia. Bencana ini telah menghancurkan sistem ekonomi, social dan mengganggu jalannya sistem politik dan pemerintahan. Kegiatan ekonomi sempat berhenti. Pasar tidak berjalan karena sistem supply dan demand tidak berkerja. Kegiatan pemerintahan memang tidak berhenti, tetapi melambat. Di seluruh dunia, pemerintah melakukan *refocusing* anggaran belanjanya untuk mengatasi masalah kesehatan dan dampak social ekonominya. Kegiatan social keagamaan berubah dari pertemuan fisik menjadi sistem *on-line*. untuk mencegah penularan. Lembaga – lembaga pendidikan seperti sekolahan dan universitas, karena kegiatan fisik berhenti beralih ke pertemua on-line atau daring.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menderita. Jokowi dan KH Maruf Amin yang baru beberapa bulan dilantik juga harus menghadapi krisis kesehatan yang berimplikasi kepada kesulitan ekonomi, politik dan social. Awalnya para pejabat publik di Indonesia sangat percaya diri (PD) bahwa Indonesia tidak akan terkena Covid 19. Tidak jelas apakah statemen mereka itu merupakan ekspresi keyakinan atau sebuah cara untuk meredam kepanikan publik. Namun demikian dampak social politiknya serius. Pemerintah dianggap “menyepelkan” bahaya silent killer ini. Banyak pejabat publik yang memandang ringan dan bahkan

merespon bahaya Covid dengan bebandan. Sementara itu pemerintah di luar negeri merespon Pandemi ini sangat serius. Langkah ini sebagaimana di siarkan di media elektronik dan media social. Karena kecerobohan pemerintah ini, kepercayaan publik menurun. Teori konspirasi berkembang.

Pada tanggal 2 Maret 2020 presiden Jokowi secara resmi mengumumkan adanya pasien pertama terinfeksi Covid 19. Temuan ini membuat pemerintah Jokowi memutar haluan kebijakan seratus delapan puluh derajat. Dari yang bersifat rileks, santai dan bahkan terkesan meremehkan, berubah menjadi serius. Angka orang terinfeksi dan meninggal dunia di Indonesia terus merangkak naik hingga hari ini menjadi 650.244 juta positif terinfeksi dan 159.676 ribu meninggal dunia. Situasi ini diikuti dengan kecemasan yang meluas di masyarakat akan ketersediaan masker, rumah sakit tabung gas, Alat pelindung diri (APD) dan juga obat-obatan. Kecerobohan pemerintah ini mendapatkan hujan kritik dari para ahli yang menganggap pemerintah Indonesia terlambat merespon kehadiran Pandemi Covid 19.

Khawatiran masyarakat pada awal Pandemi dibarengi dengan keraguan pemerintah untuk mengambil strategi penanggulangannya. Pemerintah akhirnya mengambil strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Publik berdebat mengapa pemerintah mengambil strategi Pembatasan social Berskala Besar (PSBB) bukan *lock-down* seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. PSBB ini kemudian diintegrasikan dengan strategi penanggulangan Ekonomi (PEN). Pemerintah punya keyakinan sendiri mengambil strategi PSBB, bukan lockdown. Karena strategi ini juga memungkinkan anggota masyarakat yang tidak tertular Covid 19 bisa melakukan aktivitas ekonomi, walaupun bahaya penyebaran Covid 19 dalam strategi ini lebih serius dari pada strategi *lock-down*. Selain itu pemerintah juga berhitung secara finansial. Jika mengambil *lock down* maka pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membeayai kehidupan warga yang sedang di *lock down*.

Ditengah Pandemi berlangsung, berbagai aktivitas social politik pemerintahan berjalan dengan berbagai penyesuaian. Kegiatan pemerintah juga terus berjalan walaupun melambana. Salah satu kegiatan social politik yang berjalan adalah persiapan Pemilu Serentak tahun 2024. Tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang sudah disepakati oleh DPR, Pemerintah dan KPU juga berjalan dengan berbagai penyesuaian. Isu lain yang ramai dan kontroversial adalah pergantian 272 kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan penunjukkan. Hal ini karena tidak ada Pemilukada hingga Pemilu Serentak 2024, sementara kepala daerah tersebut telah habis masa jabatannya. Bersamaan dengan benih-benih kontestasi pencalonan presiden dalam pemilu 2024 juga mulai muncul. Fenomena yang juga menonjol dan hangat adalah revisi undang-undang Otonomi khusus Papua yang juga mengundang kontroversi di masyarakat. Sementara itu pemerintah pusat mulai mensosialisasikan hajatan KTT G20 bulan November di Bali dimana Indonesia menjadi presidennya. Bagian pertama dari tiga bagian buku ini menyoroti dinamika politik dengan tema-tema ini.

Fenomena lain yang juga menjadi perhatian public selama masa Pandemi sebelumnya yang menjadi sorotan dari buku ini dan dituangkan dalam bagian kedua adalah tentang politik Islam. Tema-tema yang hangat dan mendorong penulis untuk memberikan analisa dan dituangkan dalam buku ini adalah kejadian penolakan pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS), isu Islamofobia di Indonesia dan beberapa negara, penyerangan kepada pendakwah yang dikenal luas, Syech Jabir, yang dikhawatirkan akan terjadi kepada Ulama lain, kekhawatiran public terhadap penggunaan politik identitas pada hajatan Pemilu Serentak 2024 dan Muktamar Muhammadiyah yang ke 48 yang memilih kembali Petahana Prof Haidar Nashir dan Prof. Abdul Mu'ti sebagai Ketua Umum (Ketum PP) dan Sekretaris Umum (Sekum PP) (2022-2027).

Kedua petahana ini diyakini akan melanjutkan program berkemajuan di Muhammadiyah. Bagian ketiga dari buku ini mengulas berbagai tema terkait dengan isu keamanan insani (*Human Security*). Isu yang mencuat ke permukaan yang diulas dalam buku ini adalah soal terorisme dan radikalisme baik *online* dan *off-line*, pengumpulan donasi amal yang disinyalir disalahgunakan untuk terorisme seperti kejadian yang menimpa lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tuduhan keterkaitan Masjid dan terorisme, masalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang telah ditetapkan sebagai teroris. Topik lain yang disinggung dalam tema ini terkait dengan kelembagaan Badan Intelijen Nasional yang terlibat dalam Vaksinasi Covid 19, Tantangan reformasi Polri Dalam Hari Bhangkara ke 76.

Tema-tema dalam ketiga bagian tema ini menjadi concern penulis untuk disajikan dalam sebuah artikel populer yang secara parsial telah dimuat dalam harian online Jitunews dan juga majalah online Panjimasarakat. Buku ini mengumpulkan tulisan-tulisan yang terpisah dan disusun kembali kemudian di ketgorisasi dalam ketiga tema tersebut. Sehingga benang merah dari ketiga tema tadi kelihatan. Sebagai sebuah tulisan populer, buku ini merupakan opini. Penulis sengaja menggabungkan tulisan tulisan ini dengan harapan pesan dan substansi dalam tulisan ini bisa dinikmati pembaca secara dengan lebih komprehensif dan utuh.

Penulis menyambut respon, kritikan atau masukan dari pembaca untuk dijadikan bahan perbaikan untuk edisi selanjutnya

Bekasi, 28 -November -2022

Daftar Isi

Prolog	iii
Daftar Isi	vii
Bagian I Menuju Pemilu Serentak 2024	1
1. Perlu Instrumen Aturan Siapa Menjabat Kepala Daerah Transisi	2
2. Ministry of Home Affairs Asked to Choose Acting Regent who is Anti-Radical.....	6
3. Perppu Harus Jadi Acuan dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah.....	8
4. Kriteria Ini Dinilai Harus Dimiliki PJ Kepala Daerah.....	12
5. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Harus Jaga Demokrasi dan Netralitas.....	16
6. Politik Husnul Khatimah vs Su’ul Khatimah	21
7. Tensi Politik dan Partisipasi Politik Menuju Tahun 2024..	25
8. Tren Koalisi pada Pemilihan Presiden Langsung 2024.....	29
9. Memperingat Sumpah Pemuda: Saatnya Menghilangkan Egoisme	34
10. Sumpah Pemuda dan Politik Identitas	39

11. Menanti Reshuffle Kabinet	44
12. Pemekaran Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua untuk Mengakselerasi Kesejahteraan Masyarakat Papua	49
13. Penyelesaian Isu Kashmir dapat Berkaca dari Indonesia.....	53
14. Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Presidensi G20	56
Bagian II Politik Islam.....	61
1. Penolakan Singapura pada UAS bukan Islamophobia	62
2. Akademisi: Penolakan UAS Bagian Kedaulatan Singapura	64
3. Rejection To Ustaz Abdul Somad Is Singapore's Sovereign Right	67
4. Apakah Islamofobia Ada di Indonesia?.....	69
5. Menunggu Kelanjutan Pemerintahan Taliban.....	74
6. Umat Harus Waspada Provokasi, Buntut Penyerangan terhadap Ulama	79
7. Idul Qurban dan Perang Melawan Pandemi.....	82
8. Hari Santri Nasional: Hari Anti Politik Identitas	87
9. Muktamar Muhammadiyah ke-48 : Visi Kemodernan dan Kebangsaan	92

Bagian III. Keamanan Insani (Human Security).....	97
1. Radikalisasi Secara Online Bukan Fenomena Baru	98
2. Pemerintah Dikritik Ogah-ogahan Berantas Terorisme...	100
3. Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Belum Pasti.....	102
4. Mewaspada Kebangkitan Terorisme dan Radikalisme ...	105
5. Pesantren, Masjid, dan Terorisme	108
6. Kasus ACT: Ambil Kutunya Jangan Bakar Rambutnya	112
7. Kekerasan yang Dilakukan oleh KKB Papua Harus Dihentikan.....	116
8. Soal KKB Papua, Akhirnya Komnas HAM Mendadak Beri Respons Begini.....	119
9. Keterlibatan BIN dalam Vaksinasi Massal Penting untuk Percepat Kekebalan Komunitas.....	121
10. Memperingati HUT Kemerdekaan ke-76, Memerdekakan Diri dari Covid-19	123
11. Selamat Hari Bhayangkara ke-76: Renungan dan Tantangan	128
Epilog	133
Tentang Penulis	138

Bagian I Esai Politik

1. Perlu Instrumen Aturan Siapa Menjabat Kepala Daerah Transisi.
2. Ministry of Home Affairs Asked to Choose Acting Regent who is Anti-Radical
3. Perppu Harus Jadi Acuan dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah
4. Kriteria Ini Dinilai Harus Dimiliki PJ Kepala Daerah
5. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Harus Jaga Demokrasi dan Netralitas
6. Politik *Husnul Khatimah* vs *Su'ul Khatimah*
7. Tensi Politik dan Partisipasi Politik Menuju Tahun 2024
8. Tren Koalisi pada Pemilihan Presiden Langsung
9. Memperingati Sumpah Pemuda ; Saatnya menghilangkan Egoisme
10. Sumpah Pemuda dan Politik Identitas
11. Menanti **Reshuffle** Kabinet
12. Pemekaran Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua untuk Mengakselerasi Kesejahteraan Masyarakat Papua
13. Penyelesaian Isu Kashmir Dapat Berkaca Kepada Indonesia
14. Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Presidensi G20

1. Perlu Instrumen Aturan Siapa Menjabat Kepala Daerah Transisi

MASA pemilihan kepala daerah dengan pergantian dua atau tiga tahun lagi, dapat dikatakan masih cukup lama. Untuk mengantisipasi kekosongan dimasa jabatan tersebut mendagri pernah menyatakan akan merujuk pada perundang-undangan yang lama, tapi semua itu nanti yang akan menetapkan adalah Presiden. Namun sejauh ini belum diketahui instrumen apa yang akan digunakan oleh Presiden terkait mekanisme pergantian kepala daerah. Sementara undang-undang Pemilu yang terakhir digunakan hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.

Pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia, semua komponen bangsa baik parpol maupun masyarakat harus tunduk terhadap UU pemilu tahun 2019, yang diantaranya tentang pemilu serentak. Menurut pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Dr. Sri Yunanto, M.Si. P.hD, karena pemilu diadakan secara serentak, maka akan ada sekitar 272 kepala daerah yang akan diganti tanpa melalui pemilihan kepala daerah lagi. Baca juga: Prof.Jimly : Penunjukan Plt Kepala Daerah

Sesuai UU Guna Jaga Kepastian Hukum Berarti pada masa transisi menjelang pergantian akan terjadi 'kekosongan' kepala daerah yang dipilih rakyat. Pergantian kepala daerah akan terjadi kembali pada 2025. "Kalau saya berpendapat, dalam situasi seperti ini, instrumen yang mempunyai legitimasi politik paling tinggi bagi presiden yaitu perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Alasannya, pertama, tidak ada peraturan spesifik yang menjadi dasar pergantian kepala daerah," ujar Sri Yunanto dalam sebuah acara diskusi membahas Potensi Kerawanan menjelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah pada tahun 2022 dan 2023 bersama sejumlah presiden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Dalam keterangan pers, Senin (28/2), Sri Yunanto membenarkan memang belum ada instrumen aturan yang bisa dijadikan acuan hukum, termasuk UU Pemilu tahun 2019 yang hanya mengatur tentang kesempatan dan pelaksanaan pemilukada serentak tanpa menjelaskan mekanisme pergantian kepala daerah, kewenangan pejabat pengganti sementara (plt), dan penyebab bilamana kepala daerah pengganti yang baru tidak mempunyai legitimasi politik yang kuat maka posisinya tidak akan kuat. "Karena itu poin penting yang harus diatur dalam instrumen aturan tersebut harus mencakup kualifikasi (siapa yang boleh menggantikan pejabat gubernur/bupati/walikota) bagaimana mekanisme pengantiannya, serta hak dan kewenangan," jelasnya. "Juga mengatur perihal siapa pejabat yang berhak mengangkat pilkada 'transisi' gubernur,wali kota maupun bupati. Kewenangan itu penting karena kalau dulu kewenangan yang dimiliki pejabat sementara (plt/plh) terbatas," jelas Sri Yunanto. "Baik bupati, wali kota, maupun gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Maka dia punya legitimasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu yang menggantikannya juga yang harus mempunyai legitimasi politik yang tinggi serta dipilih oleh rakyat, siapakah dia?" katanya. Menurut Sri Yunanto, posisi Kemendagri yang memiliki legitimasi administratif tidak memiliki legitimasi politik karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Maka pemilik legitimasi politik tertinggi adalah